



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS SOSIAL

Alamat: Jalan Dharma Praja No.06 Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan - Kode Pos 72271 Telp/Fax:(0518) 6076024
Website : www.dinsos.tanahbumbukab.go.id -email : dinsostanbukab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : B/000.8.3.2/041/Dinsos-Set.1/I/2024
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DAN STANDAR PELAYANANNYA DI LINGKUNGAN SKPD DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH BUMBU

DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan tugas SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, perlu penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan (SOP) Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanannya di Lingkungan SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4961);
9. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
10. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
11. Undang Undang Nomor 40 tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Sosial yang mengamanatkan untuk memberikan perlindungan fakir Miskin;
12. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pidana Anak (Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
14. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
15. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;

16. Undang-Undang...

16. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014);

17.Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah 17 kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kenaikan gaji berkala;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman pelaksanaan diversi dan Penanganan anak yang belum berumur 12 tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5732);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

23.Peraturan Pemerintah.Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 tentang Kearsipan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286;

25.Peraturan Pemerintah...

25.Peraturan Pemerintah.Nomor 39 Tahun 2012 tentang

- Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 43,
 28. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 1980 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 29. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 128);
 30. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/ HUK / tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010;
 32. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia ;Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862;
 33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 tahun 2013 tentang Program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1212;
 35. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor L282);
 36. Peraturan Menteri...
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

37.Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 71 / HUK / 2018 tentang Data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Tahun 2018 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 071;

38.Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 866;

39.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Mutasi,Berita Negara Republik Indonesia Nomor 391 tahun 2019 Iampiran IV Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;

39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Sosial Tentang Standar Pelayanan dilingkungan SKPD DINAS SOSIAL Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2024;

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada SKPD DINAS SOSIAL Kabupaten Tanah Bumbu meliputi ;

1. Rehabilitasi Sosial

- Standar Pelayanan Penanganan ABH
- Standar Pelayanan Pengangkatan Anak
- Standar Pelayanan Pengiriman Bansos Pada Disabilitas dan Lansia Miskin
- Standar Pelayanan Pengiriman Lansia Ke Pantii
- Standar Pelayanan Penanganan Pengiriman Orang Dengan Gangguan Jiwa
- Standar Pelayanan Penguburan Orang Terlantar
- Standar Pelayanan Pemulangan PSK
- Standar Pelayanan Pemulangan Gelandangan dan Pengemis
- Standar Pelayanan Pemulangan Eks Napi
- Standar Pelayanan Bansos Permakanan dan Sandang bagi Anak, Disabilitas, dan Lansia Terlantar

2. Pemberdayaan Sosial

- Standar Pelayanan Bansos KUBE
- Standar Pelayanan Bansos UEP
- Standar Pelayanan Usulan dan Verifikasi dan Validasi DTKS
- Standar Pelayanan Pengelolaan Perizinan Lembaga Kesejahteraan Sosial
- Standar Pelayanan Pemberian Izin Taman Makam Pahlawan

- Standar Pelayanan Pemberian Izin Pengumpulan Uang atau Barang (PUB)
- Standar Pelayanan Bansos RS-RLTH

3. Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Standar Pelayanan Bantuan Bencana Alam / Bencana Sosial
- Standar Pelayanan Pembukaan Dapur Umum
- Standar Pelayanan Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- KEDUA : Sttandar Pelayanan SKPD DINAS SOSIAL secara terperinci sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut diatas merupakan dokumen dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan sekaligus sebagai pedoman prosedural di SKPD DINAS SOSIAL Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Standar Pelayanan bersifat dinamis dan dapat dikaji ulang dan diperbaiki sesuai dengan perubahan kebutuhan perkembangan kapasitas perangkat daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 04 Januari 2024

Kepala Dinas,

Liana Hamita, SH, M.Kn
Pembina/IV.a
NIP.19760422 201001 2 008